

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Normalisasi Ciliwung Berantakan

DKI Batal Bebaskan 118 Bidang Tanah Dana Bagi Hasil dari Pusat Seret

JAKARTA (Pos Kota) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 defisit, Pemprov DKI Jakarta batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran kali. Padahal, pembebasan lahan itu bakal menormalisasi Sungai Ciliwung.

"Pembebasan 118 bidang tanah untuk menormalisasi Ciliwung itu, dibatalkan semua," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, Senin (11/11).

Juaini mengatakan, Dinas SDA sebenarnya sudah siap membayar 118 bidang tanah dengan anggaran Rp160 miliar. "Kami tinggal menunggu Keputusan Gubernur (Kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan," katanya.

Namun lantaran defisit anggaran, pembebasan lahan terpaksa dibatalkan. "Sebenarnya kami sudah siap bayar. Administrasinya semua sudah siap, tapi sekarang ini distop karena defisit," sambung Juaini.

Pada 2019, Dinas SDA memiliki anggaran pembebasan lahan Rp850 miliar untuk normalisasi sungai dan waduk. Anggaran yang sudah diserap Rp350 miliar. Sisa anggaran Rp 500 miliar, termasuk Rp160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Ciliwung, dibatalkan seluruhnya. "Ya bagai-

mana lagi, kan defisit anggaran," paparnya.

Dengan batalnya pembebasan 118 bidang tanah akhir tahun ini, normalisasi Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terancam terhambat. "Kalau tanah itu belum dibayar, bagaimana BBWSCC mau kerja, ya susah," ucap Juaini.

DANA BAGI HASIL

Sekda Saefullah sebelumnya mengatakan, APBD 2019 defisit karena pendapatan berupa dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun belum disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Dana bagi hasil salah satunya diberikan berdasarkan penerimaan pajak di daerah yang disetorkan ke pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah pusat berkewajiban memberikan dana bagi hasil yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada pemer-

intah daerah.

URGEN

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan keseriusan Gubernur Anies Baswedan menangani banjir di ibukota. Menyusul dihapusnya anggaran pembebasan lahan warga bantaran Ciliwung.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak menghapus anggaran pembebasan lahan warga bantaran Ciliwung. "Sungguh sayang. Seharusnya anggaran program tidak terlalu mendesak yang dihapus seperti revitalisasi JPO. Atau pangkas saja tunjangan kinerja daerah PNS yang nilainya jor-joran," tegasnya..

Prasetyo mengatakan, pembebasan lahan warga bantaran Ciliwung adalah urgen lantaran bagian upaya menormalisasi sungai dalam mengatasi banjir bandang. "Kalau anggaran itu dihapus, bagaimana kota ini bisa selesaikan masalah banjir," tandasnya. (john/ruh/st)